

Bab V

KESIMPULAN

Sebagai penutup, penulis akan memberikan pada bab kesimpulan ini. Inggris merupakan salah satu contoh negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai subjek dalam setiap pengambilan keputusan domestik sebuah negara. Inggris juga merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai primodialisme bangsanya, sebagai bangsa atau negara yang berbentuk kerajaan (monarkhi).

Sebagai salah satu negara demokrasi, Inggris cenderung lebih kooperatif baik dengan negara lain maupun organisasi Internasional, tidak terkecuali pada Uni Eropa. Inggris memiliki sejarah panjang dengan Uni Eropa bahkan sebelum Inggris bergabung dengan keanggotaan Uni Eropa pada Januari 1973. Bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa dilatarbelakangi krisis minyak pada tahun 1973, sehingga terjadi perlambatan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah di negara Inggris. Dengan bergabungnya Inggris dengan Uni Eropa diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki keadaan ekonomi negara tersebut. Sejak awal bergabungnya Inggris dengan organisasi Uni Eropa ini, beberapa dari elemen masyarakat tidak setuju terhadap bergabungnya Inggris ke Uni Eropa. Perdebatan tersebut datang dari pelaku bisnis, partai politik dan lembaga-lembaga lainnya. Hingga pada tahun kedua keanggotaan Inggris di Uni Eropa, Inggris menggelar referendum pertama kali pada tanggal 6 Juni 1975,

referendum tersebut diselenggarakan atas inisiasi partai Buruh dengan menghasilkan kemenangan bagi pendukung yang menginginkan Inggris tetap berada di Masyarakat Ekonomi Eropa dengan persentase 67% berbanding 33% dengan jumlah pemilih 64,5%.

Sedangkan pada referendum 2016, Hasil referendum menyatakan bahwa Britania Raya memutuskan keluar dari UE dengan 51,9% suara Keluar dan 48,1%. Adanya referendum 2016 dipelopori oleh Perdana Menteri David Cameron yang sekaligus menjabat sebagai pemimpin partai konservatif pada saat itu dan melalui pertimbangan evaluasi dari rakyat Inggris terkait dengan keanggotaan Uni Eropa. Terdapat ada perbedaan pada hasil keputusan referendum di tahun 1975 dan 2016, perbedaan tersebut menunjukkan adanya fundamental politik Inggris telah berubah dari tahun ke tahun.

Menurut pemikiran James T. Shotwell pada pola kebijakan luar negeri bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh publik opini dalam negeri, terlebih lagi pada studi kasus ini Inggris menganut sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi menempatkan kedudukan rakyat mampu mempengaruhi setiap proses keputusan domestik negaranya. Pada sebuah negara demokrasi pula rakyat mampu mempengaruhi politik luar negeri di Inggris. Opini rakyat tersebut ditunjukkan melalui jejak pendapat pada sebuah referendum. Referendum merupakan suatu proses pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Sehingga rakyat merasa perlu sebuah

referendum untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan keberlangsungan keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Meskipun, rakyat dan pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dalam menanggapi permasalahan tersebut. Pemerintah cenderung menitikberatkan pada kepentingan Nasional Inggris, sedangkan rakyat sebagai subjek dalam penelitian ini, maka rakyat lebih menitikberatkan kepada perasaan rakyat Inggris itu sendiri.

Inggris memiliki tingkat peradaban yang tinggi dibandingkan dengan negara eropa lainnya, Inggris juga lebih diunggulkan dalam segala sektor dibandingkan dengan negara lainnya. Keputusan Inggris tetap berada pada keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa bukan tanpa alasan, melainkan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya opini untuk meninggalkan Uni Eropa. Karena dalam penulisan ini menggunakan pemikiran idealis James T. Shotwell yang menitikberatkan rakyat, maka alasan Inggris keluar dari Uni Eropa juga terkait dengan kerugian-kerugian yang dirasakan rakyat Inggris selama keanggotaan Uni Eropa.

Ada dua alasan yang melatarbelakangi menguatnya publik opini rakyat untuk mendorong referendum Inggris, alasan tersebut adalah terkait dengan pendanaan dan Imigran. Dalam bidang pendanaan, Inggris memiliki kontribusi besar terhadap budgeting Uni Eropa. Sayangnya, kontribusi besar tersebut tidak sebanding dengan apa yang didapatkan Inggris melalui keanggotaan Uni Eropa. Sehingga, diputuskannya Inggris keluar dari Uni Eropa maka akan memutus mata rantai kontribusi budget Inggris ke Uni Eropa yang dibayarkan setiap tahunnya. Secara otomatis, akan menghemat anggaran belanja sektor publik Inggris dan

kemungkinan dapat dialihkan kepada sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan seperti misalnya pada sektor pendanaan Industri. Sementara itu, apabila Inggris tetap berada pada keanggotaan Uni Eropa, maka Imigran yang datang ke Inggris semakin meningkat. Peningkatan jumlah imigran ini tidak didukung dengan adanya jumlah lapangan kerja yang memadai, sehingga akan mengancam keberlangsungan kehidupan rakyat domestik Inggris sendiri. Jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tingkat kriminalitas juga turut meningkat. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi rakyat Inggris yang telah lama hidup di negara tersebut. Keputusan keluarnya Inggris dari Uni Eropa pada referendum 2016 merupakan keputusan yang dianggap paling efektif dalam membendung jumlah imigran yang datang ke Inggris, dibandingkan dengan pemerintah Inggris harus menerapkan regulasi baru terkait meminimalisir jumlah migran yang datang ke negara tersebut.

Keputusan Inggris untuk meninggalkan keanggotaan Uni Eropa dinilai sangat serius dan riskan. Mengingat Inggris adalah aset kuat dan sangat substansial bagi Uni Eropa. Keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga akan membawa pengaruh atau dampak buruk bagi keanggotaan negara Eropa lainnya